

# Peran ASEAN dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021

**Jusmalia Oktaviani**

Universitas Jenderal Achmad Yani  
Jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id

**Lusian Riva**

Universitas Jenderal Achmad Yani  
lusianrivaa@gmail.com

*Abstrak — The background of this research The background of this research is the military coup in Myanmar in 2021, military coup occurred because of allegations of corruption and election fraud Myanmar in 2020 won by National League for Democracy. Myanmar's people refuse the coup by doing a demonstration to government and new policies, but Tatmadaw reaction to rejection of the coup resulted a human Rights violations, many victims were killed, violence against society, and violate individual rights. This case raises the issue of human rights violations was conducted by Myanmar post military coup, ASEAN as regional organization in Southeast Asia have the authority to give a response on the issue of human rights violations in Myanmar post military coup. This research used qualitative-descriptive method with liberalism institutionalism and role of international organizations, in this research was conducted to describe the role of ASEAN in resolve the issue of human rights violations in Myanmar post military coup. The result of this research show ASEAN's role as a communication and cooperation tool to raise this issue in ASEAN's forum, ASEAN as a platform to generate of five point consensus as a positive solution for Myanmar, and ASEAN as administration platform in promoting realization of five point consensus. All forms of ASEAN's action in 2021 until 2022 is a part of ASEAN effort to resolve human rights violations in Myanmar post military coup.*

**Kata Kunci — ASEAN, Liberalism Institutionalism, Human Rights, Institutional Organizations.**

## I. PENDAHULUAN

Isu kemanusiaan merupakan permasalahan global yang sangat krusial dalam penyelesaiannya, berbagai permasalahan yang timbul berdasarkan faktor negara, iklim, politik, ekonomi dan pandemi. Merujuk pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB menyatakan pada tahun 2021, bahwa 235 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, meningkat sebanyak 40% dari tahun 2020 (Navaro, et al. 2021). Seperti yang terjadi di Myanmar pada Februari 2021 yaitu Kudeta Militer Junta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, kudeta ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing dengan dalih dugaan kecurangan Partai Suu Kyi dan korupsi yang dilakukan oleh partai Suu Kyi (BBC Indonesia, 2021). Kemenangan pemilu 2020 oleh partai *National League for Democracy* (NLD) yang dituduh penuh kecurangan, Junta juga menuduh bahwa kepemimpinan partai NLD pada periode sebelumnya melakukan korupsi. Militer Junta mendeklarasikan bahwa kudeta militer ini akan berlangsung selama satu tahun, hingga pada tahun 2022 kudeta ini belum terselesaikan dan yang menjadi sorotan dunia adalah tindakan kekerasan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Junta Militer.

Dalam perjalanan politiknya, Myanmar baru menjalankan pemerintahan demokrasi pada tahun 2010 (Ivana S, D.J et al, 2021) itu terjadi saat pemilu berlangsung dan dilakukan di bawah pengawasan militer. Untuk

mempertahankan demokrasi politiknya, Myanmar terus menerus mengalami konflik yang mengancam stabilitas negara, terutama dalam isu kemanusiaan, yaitu pelanggaran HAM.

Lahir sebagai negara yang *multi-ethnic, multi-lingual* dan *multi-religious*, Myanmar secara resmi mengakui ada 135 kelompok etnis yang berbeda, hal ini menyebabkan adanya berbagai konflik etnis maupun politik yang terjadi. Demokrasi yang bergeser menjadi otoriter ini memicu perhatian politik internasional, karena Myanmar menjadi negara yang dikecam mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia besar-besaran karena adanya konflik minoritas Ronghiya lalu kudeta militer 2021, PBB menilai bahwa pasukan militer Myanmar telah secara terang-terangan mengabaikan nyawa manusia (United Nations, 2022).

Dilansir dari Aljazeera pada pertengahan Agustus 2021, sejak kudeta militer berlangsung ada sekitar 1006 orang yang mati dan juga dibunuh oleh militer, ini termasuk demonstran, wartawan dan juga masyarakat sipil (Al Jazeera, 2021). Hal ini mendapatkan respon dari dunia internasional yang melihat mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana banyak negara yang mengecam dan menjatuhkan sanksi pada Myanmar. Seperti AS yang memblokir dana pemerintah Myanmar untuk akses militer serta Eropa dan Korea membekukan kerja sama mengenai perdagangan dan pertahanan (Garmabar, 2021) hal ini jelas akan menyulitkan Myanmar dalam pertahanan. Selain itu, PBB juga mengecam Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan meminta Myanmar untuk menghormati kebebasan fundamental, HAM dan patuh pada supremasi hukum (Garmabar, 2021).

Pada awalnya, media internasional kesulitan dalam mencari dan meliput kudeta militer ini khususnya mengenai para korban dan aksi militer, namun saat ini media dan NGO fokus pada pelanggaran HAM yang terjadi. Kudeta militer yang dilakukan oleh Tatmadaw ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran, yang mana protes anti kudeta ini dimulai di Yangon dan mengakibatkan 230.000 warga sipil terkena serangan udara militer dan senjata berat, pengunjung rasa awalnya fokus pada pembebasan Aung San Suu Kyi namun militer

semakin memperparah keadaan dengan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (The Swe Win, 2021) hal ini menyebabkan demonstran memperluas fokus mereka terhadap HAM.

Dari banyaknya jumlah korban, Myanmar semakin menjadi perhatian internasional. Kecaman internasional tidak hanya ditujukan untuk Myanmar, namun juga terhadap ASEAN yang berperan sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar. ASEAN merupakan instisusi internasional di Asia Tenggara ini memiliki wewenang untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Berdasarkan tujuan ASEAN, tindakan dan keputusan ASEAN ini akan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik di Asia Tenggara, dan hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan prinsip non-intervensi.

ASEAN sendiri memiliki penyelesaian tersendiri dalam menghadapi konflik, yaitu dengan cara diplomasi sesuai prinsip-prinsip ASEAN. Diplomasi yang diusung ialah *ASEAN Way of Diplomacy* yang digunakan untuk mengimplementasikan isi dari *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia* sebagai panduan anggota untuk memegang prinsip non-intervensi serta menghormati kedaulatan negara anggota (Putri, et. al, 2021). Berkaitan dengan HAM, ASEAN sendiri memiliki fokus terhadap HAM yang dibuktikan dengan adanya lembaga penegak HAM ASEAN yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang mana bergerak untuk melindungi negara-negara yang terkena pelanggaran HAM.

Maka dalam menghadapi konflik HAM, ASEAN memiliki dasar untuk menjadi wadah dan memberi solusi bagaimana menyikapi pelanggaran HAM pasca kudeta militer di Myanmar. ASEAN kembali dibantu Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan diplomasi dalam menghadapi Kudeta Militer dimana ASEAN melakukan pertemuan pada 24 April 2021 (Tom Allard, 2021) dalam pertemuan ini, anggota menekan Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Jenderal Min Aung Hlaing ini menghasilkan kesepakatan berupa lima poin konsesus untuk menyikapi

krisis di Myanmar.

Peran ASEAN sebagai organisasi regional yang mengutamakan kerjasama antar negara ini sangat penting bagi stabilitas kawasan, sebagaimana peran organisasi internasional yang dijelaskan oleh A. LeRoy Bennet mengatakan bahwa fungsi utama dari organisasi internasional ini adalah menyediakan sarana sarana kerjasama antar negara (D. A. Putri, 2019). Maka sikap ASEAN dalam menghadapi pelanggaran Hak Asasi Manusia ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana peran ASEAN, bagaimana langkah-langkah ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer dan melihat bagaimana pengaruh kesepakatan yang telah disepakati oleh ASEAN.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memulai penelitian ini dengan menjelaskan mengenai ASEAN dengan menganalisis prinsip dan bagaimana ASEAN menghadapi isu pelanggaran HAM khususnya kudeta militer di Myanmar, lalu penulis akan menjelaskan bagaimana awal dari kudeta militer terjadi hingga isu pelanggaran HAM yang dilakukan Tatmadaw, dan tulisan ini akan ditutup dengan pembahasan yang menjelaskan peran ASEAN dalam menghadapi isu pelanggaran HAM pasca kudeta militer di Myanmar, bagaimana langkah dan kerjasama ASEAN serta hambatan apa yang dialami oleh ASEAN. Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis langkah diplomasi serta peran dan kebijakan asean dalam menghadapi isu pelanggaran HAM pasca kudeta militer di Myanmar tanpa mengesampingkan prinsip non-intervensi. Dalam menjawab analisis tersebut, tulisan ini menggunakan Konsep Organisasi Internasional dan Teori Liberalisme Institusional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun penelitian yang sudah membahas mengenai ASEAN dan Myanmar yang berkaitan dengan sikap dan kerjasama ASEAN terhadap kudeta militer di Myanmar. Ambarawati melakukan penelitian mengenai 'Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta' di tahun 2022, penelitian Ambarawati mempertanyakan apakah ASEAN ada dalam dilemma antara kedaulatan dan

persoalan HAM? Apakah negara anggota ASEAN perlu meninggalkan ASEAN Way dalam mendukung dan melindungi hak asasi warga Myanmar pasca kudeta militer? (Ambarawati, 2022). Artikel tersebut didukung dengan konsep prinsip non-intervensi, HAM, *Responsibility to Protect* dan teori *English School* yang mana menghasilkan asumsi bahwa kesadaran mengenai HAM dari para elit pemimpin ASEAN dikatakan terlambat, karena para pemimpin ASEAN memiliki prioritas utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian tersebut Ambarawati menjelaskan ASEAN tidak memiliki dilema antara *sovereignty* dan *humanity*, namun ASEAN memiliki *code of conduct* sebagai bentuk implementasi dari ASEAN Way dengan ciri khas dialog dan solusi damai (Ambarawati, 2022).

Penelitian berikutnya berjudul 'Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN Terhadap Upaya Negosiasi Indonesia dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar' yang ditulis oleh Zahratunnisa dan Mabrurah. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan tindakan yang diambil oleh Indonesia untuk menangani isu kemanusiaan pasca kudeta militer di Myanmar, penelitian ini menjelaskan peran ASEAN dikatakan sebagai wadah atau media yang dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah, dan prinsip non-intervensi ini merupakan batu loncatan bagi ASEAN untuk merespon masalah internal dan tantangan eksternal (Ramadhani dan Mabrurah, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berhubungan mengenai sikap ASEAN terhadap pelanggaran HAM pasca kudeta hingga pengaruh prinsip non-intervensi ASEAN, menganalisis mengenai sikap dan kebijakan serta prinsip non-intervensi yang berpengaruh terhap pengambilan keputusan untuk menghadapi Myanmar, menjelaskan mengenai respon ASEAN terhadap persoalan HAM yang terjadi pasca kudeta di Myanmar. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terhadap peran ASEAN dan menganalisis bagaimana pengaruh lima poin konsensus terhadap sikap Myanmar, dan menjelaskan perkembangan dari tindakan ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM pasca kudeta militer.

### III. HASIL DAN ANALISIS

#### ASEAN dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

Organisasi internasional ASEAN merupakan organisasi regional yang saat ini menaungi 11 negara di Asia Tenggara, salah satunya Myanmar. Dalam melaksanakan tugasnya, ASEAN memiliki beberapa tujuan dan kerjasama dibawah piagam ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum, fokus ASEAN juga berkembang pesat khususnya mengenai pelanggaran HAM.

Organisasi internasional yang berdiri pada 8 Agustus 1967 ini awalnya diusung oleh lima negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Hingga saat ini ada 11 negara dibawah naungan ASEAN, dan Timor Leste menjadi negara yang baru bergabung dengan ASEAN di tahun 2020. ASEAN memiliki instrumen pokok yaitu ASEAN Charter yang terbentuk pada November 2007 di Singapura dalam KTT ASEAN yang ke-13, ASEAN menegaskan kembali mengenai prinsip-prinsip yang tertuang pada perjanjian, deklarasi ASEAN.

Perkembangan ASEAN terbilang sangat cukup kuat dalam urusan bilateral dan kerjasama, pada perkembangannya ASEAN telah membuat perubahan bagi Asia Tenggara maupun memberikan keuntungan bagi anggotanya, ASEAN memiliki 15 poin tujuan dan 14 prinsip-prinsip yang ada, khususnya mengenai hak negara dan individu yang berasa di kawasan, menjunjung tinggi demokrasi, serta prinsip non-intervensi (Oratmangun, 2010) resolusi yang dihasilkan oleh diplomasi dan negosiasi antar anggota sebagai penyelesaian konflik ini selalu dilakukan melalui pertemuan, dimana ASEAN menyediakan forum untuk mendiskusikan sebuah kesepakatan.

Perkembangan HAM di Asia Tenggara juga terbilang penting untuk didiskusikan, HAM merupakan prioritas utama setiap individu dalam menjalani kehidupan sehingga perlu diperjuangan oleh setiap pihak khususnya negara dan organisasi yang berwenang. Setiap negara memiliki kewenangan untuk memperjuangkan hak

masyarakat, bahkan dalam OI seperti PBB menjelaskan bahwa hukum dan politik dari norma atau HAM ini ditetapkan melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 oleh majelis umum PBB, ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya HAM bagi kehidupan setiap individu, khususnya OI kawasan seperti ASEAN.

Asia Tenggara terbentang luas secara geografis, dimana memiliki kultur yang berbeda seperti ragam politik dan budaya sehingga perlunya mengelola HAM secara efektif dan menyeluruh. Pada tahun 1993 Asia menyelenggarakan konferensi di Bangkok yang bernama *The Regional Meeting for Asia of The World Conference on Human Rights* yang dilaksanakan untuk menyatukan perspektif regional mengenai HAM (Hsien-Lie, 2011) dan pada saat itu masih sulit mengembangkan HAM pada institusi karena adanya perbedaan relativisme budaya maupun ideologi. Namun seiring berjalannya waktu, HAM cukup berkembang yang mana menjadi salah satu fokus dan tujuan untuk meningkatkan keamanan regional sehingga dukungan politik bagi HAM khususnya lembaga HAM juga diperlukan.

Pada tahun 1998 saat memperingati UDHR membahas mengenai HAM ASEAN, pembahasan itu berkembang membentuk *Vientiane Action Program* pada 2004 yang berfungsi untuk memperkuat jalan ASEAN mengenai politik, ekonomi, dan bidang lainnya yang juga termasuk untuk berkomitmen mengembangkan HAM di bawah komunitas keamanan ASEAN dengan berbagai kegiatan HAM (Hsien-Lie, 2011). Hingga ASEAN mengembangkan HAM dengan membentuk Komisi antar Pemerintah ASEAN untuk HAM atau AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) yang diresmikan di Hua Hin Thailand, pada Oktober 2003 dalam ASEAN Summit ke-15. Tujuan dan fungsi dari AICHR ini juga diselaraskan dengan standar HAM yang ada khususnya yang tertera pada UDHR, seperti menjadi *supporter* bagi negara yang terkena pelanggaran HAM dan melakukan kerjasama regional mengenai HAM.

Meskipun AICHR mendapat kritik yang dianggap tidak mampu mewakili kepentingan negara anggota, mengenai

mandat dan fungsi yang tidak rinci mengatur perlindungan HAM dan mekanisme penegakan HAM ASEAN (Purwandoko, 2021) namun ASEAN berhasil menyepakati Deklarasi HAM pada KTT ASEAN Ke-21 di Phnom Penh tahun 2012 dengan upaya memajukan HAM. dalam deklarasi ini terdapat banyak kesepakatan dan pernyataan mengenai perlindungan HAM seperti perdamaian, pengembangan, hak sipil dan politik, ekonomi dan sosial budaya.

**Tabel 1. KASUS ISU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA**

Negara	Tahun	Pelanggaran HAM
Kamboja	2017-2022	Penangkapan oposisi politik, dan membatasi <i>freedom of speech</i>
Indonesia	2015-2022	Pelecehan wartawan asing, eksploitasi anak
Malaysia	2017-2022	Membatasi <i>freedom of expression</i> , <i>human trafficking</i> , perizinan pernikahan anak dibawah umur
Myanmar	2017-2022	Ronghiya, kudeta militer
Filipina	2016-2022	<i>War on Drugs</i> : menghilangkan ribuan nyawa penduduk kota miskin termasuk anak-anak
Singapura	2017	Membatasi <i>Freedom of speech</i>
Thailand	2014-2017	Membatasi <i>Freedom of speech and expression</i>
Vietnam	2017	Membatasi <i>Freedom of expression</i>
Laos	2012-2017	Membatasi <i>Freedom of speech</i> , larangan berserikat dan berkumpul
Brunei Darussalam		Tidak ada laporan dari <i>Human Rights Watch</i>

Sumber: *Human rights in Southeast Asia pada ASEAN-Australia Summit Sydney 2018, Human Rights Watch 2018*

Dalam analisis laporan kasus pelanggaran HAM tersebut, dapat dikatakan bahwa negara-negara di Asia Tenggara masih banyak melanggar HAM mengenai

*freedom of speech* yang diakibatkan oleh kondisi politik negara, didukung dengan kekerasan dari berbagai pihak khususnya militer itu negara itu sendiri seperti yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer yang memakan ribuan korban. Meskipun ASEAN memiliki lembaga HAM untuk menjadi wadah dalam memberantas pelanggaran HAM, namun masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara, membuktikan bahwa fungsi dari lembaga HAM ini masih harus ditingkatkan sehingga tidak menjadi hambatan ASEAN untuk berperan membantu menghadapi konflik pelanggaran HAM.

### **Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021**

Myanmar merupakan negara yang merdeka dari Inggris pada tahun 1948 dengan waktu jajahan 62 tahun, merupakan negara yang berbentuk republik persatuan yang berdaulat. Pada 2022 PBB melaporkan bahwa populasi Myanmar bertambah menjadi 55 juta, dimana penduduk Myanmar menggunakan Bahasa Burma atau *Burmese* sebagai bahasa resmi di Myanmar. keragaman etnis di Myanmar ini membuat Myanmar memiliki 135 Ras, berbagai etnis membuat Myanmar memiliki banyak budaya yang menyebabkan banyak perbedaan dalam cara pandang kehidupan, agama, dan juga politik.

Myanmar memiliki pengaruh yang sangat kuat mengenai kekuasaan militer, bahkan masyarakat sipil juga membatasi bahwa agama adalah salah satu bagian dari kontrol negara yang berarti agama dapat mengontrol pola pemerintahan sendiri dan di Myanmar sejak tahun 1962 budaya, agama, dan etnis telah menjadi kunci untuk kekuasaan, konflik dan perlawanan (Cho and Gilbert, 2021). Saat Myanmar melakukan transisi politik ke Demokrasi, Myanmar berupaya untuk mengontrol dan membangun identitas budaya secara khusus, banyak perubahan yang terjadi dimana negara semakin mendukung dan melindungi namun menimbulkan konflik karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Pada tahun 1948-1962 Myanmar memiliki pemerintahan sipil yang dibentuk dibawah konstitusi 1947, saat itu juga dibentuk Panglong *Declaration* yang merupakan Deklarasi persetujuan antar

etnis Myanmar dimana menjanjikan hak otonomi dibawah pemerintahan Aung San, namun hal ini tidak pernah terwujud karena kematian Aung San.

Perkembangan politik myanmar khususnya pada masa periode dibawah pimpinan militer tahun 1958-1960 dan 1962-2011. Kudeta militer terjadi tahun 1962-1988 dipimpin oleh Jenderal Ne Win, lalu pada tahun 1987 Jenderal Sein Lwin menggantikan Ne Win namun terjadi pemberontakan besar-besaran yang dikenal dengan 888 *uprising*, dimana minoritas Burma membentuk *Front Demokratik Nasional*. Lalu pada tahun 1988-2011 era *state law and order restoration council* dan *state peace development council*. Terjadi demokrasi politik sekaligus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar pada tahun 2012-2021, transisi politik ke demokrasi ini menimbulkan konflik politik dan diskriminasi pada etnis, hingga tahun 2021 kembali terjadi kudeta militer.

Kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing diawali dengan kemenangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang merupakan partai sipil di Myanmar, pada saat itu NLD memenangkan 83% kursi di pemerintahan (Goldman, 2022), NLD menjadi partai yang memiliki popularitas tinggi di Myanmar, dan juga ketua partai NLD Aung San Suu Kyi menjabat sebagai pemimpin *de facto* dari tahun 2015.

Militer menolak hasil pemungutan suara karena merasa bahwa hasil suara dilihat berdasarkan referendum atas popularitas Suu Kyi, militer menyatakan bahwa hasil pemilu curang dan pemerintahan Suu Kyi melakukan korupsi saat menjabat, hal ini diperjelas dengan adanya pernyataan dari Mahkamah Agung bahwa pemilu yang dilakukan pada November 2020 berisi kecurangan. Puncaknya pada tanggal 1 Februari 2021, militer mengepung gedung pemerintahan dan menahan para pemimpin NLD Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, Menteri Kabinet, Menteri Daerah, politisi oposisi, aktivis dan juga penulis. Pada saat itu kudeta diumumkan melalui Stasiun TV Myawaddy yang merupakan stasiun tv militer. Saat itu juga Myanmar melakukan pembekuan terhadap internet dan akses telepon, sehingga media kesulitan mencari informasi mengenai Myanmar. Ekonomi

internasional juga diberhentikan seperti pasar saham dan bank komersial, penerbangan domestik dan internasional tidak beroperasi sehingga perekonomian terhambat.

Kondisi pemerintahan silih berganti dimana *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH) yang merupakan sekelompok anggota terpilih parlemen Myanmar yang dipimpin NLD, komite membentuk *National Unity Government* (NUG) yang dipimpin oleh Duwa Lashi La sebagai presiden menggantikan U Win Myint lalu militer menyatakan beberapa perwakilan kelompok etnis minoritas merupakan kelompok teroris, kudeta semakin gencar dilakukan hingga pada 5 Mei Pemerintah Persatuan Nasional membentuk Tentara Pertahanan Rakyat atau *People's Defence Force* (PDF) untuk melawan kekerasan terhadap Dewan Administrasi Negara "Kekerasan terhadap Publik dan Serangan Militer", pada 7 September mendeklarasikan *People's Defensive War* untuk melawan militer Junta karena semakin meningkatnya kekerasan di Myanmar.

Saat kudeta militer berlangsung, protes terjadi dimana-mana yang menyebabkan korban jiwa, sebelumnya protes berlangsung secara damai namun pada 20 Februari 2021 dua pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dibunuh oleh pasukan keamanan militer di Mandalay (Goldman, 2022) salah satu korban adalah remaja laki-laki berusia 16 tahun. Semakin hari perlakuan militer terhadap demonstran semakin diluar kendali, bahkan pada bulan maret 2021 militer menembaki pengunjuk rasa dimana korban mencapai ribuan orang lebih. Amnesty Internasional mengatakan bahwa telah memeriksa lebih dari 50 klip video dari tindakan kekerasan yang sedang berlangsung dan menyimpulkan militer menggunakan taktik serta senjata cocok di medan perang (Amnesty Internasional, 2021). Senjata yang digunakan seperti peluru karet, gas air mata, meriam air, peluru tajam dan granat.

Menurut Amnesty International, militer menggunakan strategi *Four Cuts* untuk menghentikan EAO (*Eight Ethnic Armed Organizations*) dan PDF dari segi pendanaan, makanan, intelijen, serta proses rekrutmen yang memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil (Amnesty Internasional, 2021). *UN Special Reporter* untuk Myanmar

juga melaporkan keadaan ini, pada 10 Mei dilaporkan bahwa pasukan keamanan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dalam menekan demonstran, hal ini telah menewaskan sedikitnya 782 orang sejak kudeta pada 1 Februari dan 3.740 orang ditahan (Colville, 2021) sikap ini menunjukkan bahwa sikap berwenang terus melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Myanmar.

Pada Desember 2021, serangan membabi buta yang ditujukan terhadap warga sipil dan pertempuran antara militer, EAO, dan PDF membuat lebih dari 284.700 orang mengungsi, termasuk lebih dari 76.000 anak-anak (Amnesty Internasional, 2021) sikap militer ini jelas membuat pihak internasional marah dan tidak terima, pembunuhan dan penyerangan terstruktur ini jelas melanggar hak asasi manusia. Myanmar hanya membuat kesepakatan tanpa mengimplementasikan kesepakatan tersebut.

**Tabel 2. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA KUDETA MILITER DI MYANMAR TAHUN 2021-2022**

<b>Penindasan Perbedaan Pendapat</b>
<b>Kebebasan Berekspresi dan Berserikat</b>
<b>Penyiksaan dan Perlakuan Buruk</b>
<b>Serangan terhadap Warga Sipil</b>
<b>Pengungsi dan Penolakan Akses Kemanusiaan</b>
<b>Hak Atas Kesehatan</b>
<b>Hak Atas Pendidikan</b>
<b>Eksekusi Mati Tahanan Politik</b>

Sumber: Amnesty Internasional, UN Report, dan The Guardian 2021-2022

Dari data pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar semakin hari semakin bertambah korban jiwa dan kekerasan, bahkan hak anak-anak tidak terpenuhi, hal ini jelas sudah melanggar HAM dan dalam kasus ini diperlukan bantuan-bantuan pihak lain. Hal ini jelas sudah melanggar HAM, dan dalam menghadapi kasus ini diperlukan bantuan-bantuan pihak lain untuk memberi bantuan, melindungi hak asasi manusia, dan mempertahankan hak-hak masyarakat untuk hidup di tengah kegaduhan pemerintahan. Dalam pandangan HAM itu sendiri negara perlu memiliki mekanisme-mekanisme

HAM yang baik, serta lembaga HAM yang bersifat independen sehingga berpihak pada korban (Wahyuningrum, 2022) Maka dalam hal ini ASEAN sebagai organisasi regional yang juga menaungi Myanmar memiliki sikap dalam menghadapi pelanggaran HAM ini, ASEAN sebagai organisasi regional dengan dasar Piagam ASEAN yang mendorong demokrasi dan juga mengadopsi nilai-nilai Konvensi HAM PBB memiliki wewenang untuk menghadapi dan memberi sikap atas terjadinya kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM pasca kudeta militer di Myanmar.

### **Peran Asean Dalam Menghadapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021**

ASEAN yang merupakan organisasi regional ini memiliki peran penting terhadap konflik yang terjadi di kawasan, khususnya pada kasus pelanggaran HAM ini. ASEAN organisasi yang bersifat demokratis dan liberal, maka dalam penyelesaiannya ASEAN menggunakan cara-cara demokratis seperti melakukan kerjasama, pertemuan untuk menghasilkan kesepakatan yang ada hal ini juga dijelaskan menggunakan teori liberalisme institusional yang menjelaskan bahwa kerjasama antar negara harus diorganisir maka tujuan-tujuan akan diatur dalam seperangkat tertentu (Burchill, 2005) Liberalisme institusional juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak dasar manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa peran ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi pasca kudeta militer di Myanmar tahun 2021 berdasarkan teori peran organisasi internasional menurut A. LeRoy Bennett sebagai sarana kerjasama dan komunikasi, wadah atau tempat dan sebagai sarana administratif.

### **Peran ASEAN sebagai sarana Kerjasama dan Komunikasi**

Dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer ini, negara anggota ASEAN memiliki sikap yang berbeda-beda, namun hal ini tetap dihadapi melalui kesepakatan yang dibuat, dimana adanya kerjasama dan komunikasi antar negara sehingga dapat dikasi secara bersama dan mempermudah akses

antar anggota. Pada awalnya, Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun 2021 menyatakan bahwa negara anggota ASEAN mengikuti perkembangan Myanmar, namun Myanmar harus melihat kembali prinsip dan tujuan Piagam ASEAN yang didalamnya menjelaskan bahwa negara anggota patuh terhadap prinsip demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, hormat dan melindungi HAM (ASEAN, 2021).

Pada awalnya, negara anggota memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun, ada yang mengungkapkan keprihatinan, dan ada yang menganggap bahwa permasalahan di Myanmar ini adalah permasalahan internal negara. Namun saat penahanan Suu Kyi beserta jajaran pemerintahan NLD, negara ASEAN mengungkapkan kekhawatiran yang serius. Seperti Indonesia, Singapura dan Malaysia menyatakan keprihatinan dan kekhawatirannya diikuti oleh Filipina. Disisi lain, Kamboja dan Thailand berfikir bahwa itu merupakan permasalahan internal negara. Namun keadaan semakin memburuk sehingga Indonesia menyatakan mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan melakukan dialog.

Pada 2 Maret 2021 ASEAN mengadakan pertemuan secara informal dan dilakukan melalui video konferensi secara virtual, *Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM)* ini memiliki maksud untuk mengimplementasikan tujuan dan visi komunikasi ASEAN 2025, dan bertukar pandangan tentang isu regional. pertemuan ini direncanakan dari hasil komunikasi Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia pada 5 Februari 2021, yang menilai bahwa pentingnya ASEAN bertemu untuk membahas situasi Myanmar dan juga merencanakan apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi situasi ini (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2021) Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia selaku anggota ASEAN ini merupakan dorongan kerjasama untuk ASEAN dalam membentuk forum dialog antar negara anggota.

### **Peran ASEAN Sebagai Forum dalam *The ASEAN Leaders' Meeting 24 April 2021***

Setelah melakukan IAMM pada 2 Maret 2021, ASEAN

menyatakan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi di Myanmar, namun kondisi semakin diperparah saat meningkatnya korban pelanggaran HAM. Dunia internasional pun mengecam Myanmar khususnya Dewan Keamanan PBB yang menganggap bahwa militer Myanmar telah mengabaikan HAM. Menindaklanjuti hasil dari IAMM itu sendiri yang menyatakan bahwa ASEAN perlu melakukan dialog konstruktif untuk mencari solusi dan membantu Myanmar secara positif. Maka pada 24 April 2021, ASEAN melakukan pertemuan khusus yang dihadiri oleh negara anggota untuk membahas kondisi di Myanmar.

Pada 24 April 2021, diketuai oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan dihadiri oleh pemimpin negara anggota ASEAN serta Filipina, Thailand dan Laos yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, disisi lain Myanmar memutuskan hadir dalam KTT ASEAN ini diwakili oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang merupakan pemimpin kudeta militer Myanmar. Kehadiran Min Aung Hlaing ini disetujui oleh semua negara ASEAN, namun tidak berarti hadir sebagai kepala negara Myanmar di KTT sehingga ASEAN menganggap kehadiran Min Aung Hlaing sebagai wakil dari utusan Myanmar (Aljazeera, 2021) hal ini karena ASEAN menganggap bahwa pemerintahan Myanmar masih dibawah Presiden Win Myint.

Pertemuan ini membahas mengenai kondisi politik Myanmar dan kekerasann yang dilakukan oleh militer Myanmar, karena dalam tiga bulan pasca kudeta militer kekerasan oleh pasukan keamanan telah merenggut nyawa sedikitnya 753, dengan memutus internet setiap malam dan membatasi komunikasi publik (Strangio, 2021) sehingga perlunya ASEAN menjadi wadah untuk membentuk kesepakatan yang dapat membantu Myanmar sesuai fungsi dari organisasi internasional itu sendiri. Dalam *press release Chairman's Statement on The ASEAN Leaders' Meeting anggota ASEAN* menjelaskan bahwa ASEAN menerima laporan kematian dan kekerasan yang dialami korban di Myanmar, juga memperhatikan mengenai tahanan politik yang didalamnya termasuk orang asing sehingga ASEAN menyepakati Lima Poin Konsensus sebagai solusi damai untuk kepentingan dan



kehidupan rakyat Myanmar.

ASEAN mengakui peran positif dan konstruktif organisasi regional yang menaungi Myanmar sangat penting untuk memfasilitasi forum untuk membentuk kesepakatan solusi damai, lima poin konsensus berisi: (1) Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri, (2) kedua, dialog konstruktif diantara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat, (3) ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi media proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN, (4) Keempat, ASEAN akan menyediakan bantuan kemanusiaan melalui *AHA Centre*, (5) Kelima, utusan khusus delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait. (ASEAN, 2021).

Anggota ASEAN khususnya Myanmar menyepakati poin-poin konsensus dengan menekankan bahwa Myanmar harus menghentikan kekerasan dan melakukan dialog atau komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari pertemuan dan lima poin konsensus ini adalah untuk mengembalikan situasi Myanmar dalam keadaan normal serta menghentikan kekerasan (Wahyuningrum, 2022) Dalam pertemuan ini tidak secara langsung menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Myanmar, namun ASEAN menyinggung mengenai kekerasan yang dilakukan serta menerima laporan terkait kematian dan pelanggaran HAM yang ada karena kekerasan terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan hak politik adalah bagian dari pelanggaran HAM, ASEAN juga bertujuan untuk memberikan ruang dan peran produktif yang dapat mempersiapkan misi dan diawali dengan bantuan kemanusiaan (Kharisma, 2022). dari dua perspektif ini dapat dilihat bahwa ASEAN berperan sebagai wadah dalam memfasilitasi forum yang dapat membuat kesepakatan-kesepakatan untuk dapat direalisasikan menjadi tindakan nyata yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan sesuai dengan nilai-nilai piagam ASEAN.

## Peran ASEAN Sebagai Sarana Administratif

Bennet menjelaskan bahwa salah satu peran organisasi internasional adalah sebagai sarana administratif dimana setelah membuat keputusan, organisasi berperan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan keputusan menjadi tindakan yang nyata. ASEAN berperan sebagai mekanisme administratif dalam mewujudkan keputusan bersama. Hal ini dapat dilihat dalam kesepakatan lima poin konsensus yang merupakan kesepakatan ASEAN terhadap Myanmar, dimana Myanmar harus mewujudkannya karena ikut dalam menyepakati lima poin konsensus tersebut, namun dalam merealisasikan konsensus tersebut diperlukan langkah-langkah kooperatif antara Myanmar dan ASEAN.

ASEAN memantau Myanmar dan selalu melibatkan kondisi politik Myanmar dalam pertemuan-pertemuan, seperti pada *Joint Communique of The 54<sup>th</sup> ASEAN Foreign Ministers Meeting* yang diselenggarakan pada 2 Agustus 2021 ASEAN mengeluarkan statement bahwa menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam menjadi Special Envoy ASEAN untuk Myanmar yang diharapkan dapat dengan penuh memberikan garis waktu yang jelas mengenai Lima Poin Konsensus khususnya dibidang kemanusiaan. Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar merencanakan kunjungannya pada bulan Oktober, namun rencana itu batal ketika Junta memutuskan untuk tidak memberikan akses pertemuan dengan Aung San Suu Kyi dan pemimpin-pemimpin sipil yang ditahan (Human Rights Watch, 2021) Tindakan Myanmar dinilai mengabaikan lima poin konsensus.

Semakin hati korban dari tindakan kekerasan kudeta militer ini semakin meningkat, dan pada 15 Oktober 2021 ASEAN menggelar *The Emergency ASEAN Foreign Ministers' Meeting* melalui konferensi video, pertemuan ini untuk mempersiapkan KTT ke-38 dan KTT ke-39 yang akan berlangsung pada 26-28 Oktober 2021, dalam pertemuan ini ASEAN hanya akan mengundang utusan non-politik Myanmar saja. Peneliti melihat bahwa keputusan ini merupakan sanksi tidak tertulis yang dilakukan oleh ASEAN karena tidak adanya perkembangan

baik yang dilakukan oleh Myanmar terkait lima poin konsensus tersebut, jika memberi sanksi tertulis akan terlihat seperti ASEAN merusak prinsip tidak ikut campur maka diundang utusan non-politik karena ASEAN sebagai lembaga netral.

Pada KTT ke-38 dan ke-39 ASEAN membahas mengenai situasi Myanmar, ASEAN menegaskan untuk segera menghentikan kekerasan Myanmar dan memulai untuk mencari solusi damai melalui dialog konstruktif dimana ketua ASEAN akan memfasilitasi hal tersebut, ASEAN juga akan memberikan bantuan kemanusiaan secepatnya melalui *AHA Centre*.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut langkah-langkah ASEAN untuk mewujudkan lima poin konsensus adalah dengan menjadi sarana dan memberikan fasilitas bagi Myanmar, namun Myanmar belum dapat mewujudkan kesepakatan tersebut. Myanmar merasa tidak melanggar ketentuan dalam ASEAN Charter, dalam pandangan ASEAN yang dilakukan oleh Myanmar ini melanggar pasal-pasal konstitusional pemerintahan karena ASEAN bersepakat bahwa pergantian pemerintahan ini harus secara damai melalui demokratik proses, berbeda dengan posisi Myanmar karena menganggap bahwa kudeta ini sah dilakukan dalam konstitusi negaranya sehingga perbedaan perspektif ini yang menghambat proses realisasi lima poin konsensus (Wahyuningrum, 2022) Setiap negara anggota ASEAN memiliki konstitusi negara sendiri, namun mengenai hak asasi manusia, negara anggota ASEAN memiliki kesepakatan yang sama dalam Deklarasi HAM ASEAN khususnya Myanmar yang juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut, dan dalam pandangan liberalisme institusional organisasi merupakan aktor utama yang mengharuskan negaranya dalam melindungi diri tanpa merusak kebebasan individu warganya.

### **Realisasi Lima Poin Konsensus**

Dalam realisasi lima poin konsensus ini, ASEAN berperan sebagai sarana administratif untuk membantu mewujudkan kesepakatan tersebut. Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar telah disepakati yaitu Park Sokhonn yang

merupakan Sekretaris Jenderal ASEAN dan *AHA Centre* dengan pemerintahan Myanmar dan *Myanmar Red Cross Society* (MRCS) berhasil berkunjung ke Myanmar pada 21-23 Maret 2022 membahas mengenai kiriman bantuan melalui *AHA Centre* dan juga ada tiga prioritas yang diserukan oleh Utusan Khusus ASEAN yaitu menghentikan kekerasan, melanjutkan pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar dan melakukan dialog antara semua pihak.

Pada 6 Mei 2022, Berdasarkan *press release hasil dari Consultative Meeting on ASEAN Humanitarian Assistance to Myanmar*, mendiskusikan tiga poin utama mengenai kerangka aturan pengiriman ASEAN *Humanitarian Assistance*, menangani *operational challenges of the delivery of Humanitarian Assistance*, dan mengatur kerangka kerja untuk administrasi Vaksin Covid-19 di Myanmar. Dari pertemuan ini disepakati bahwa *AHA centre* akan melakukan identifikasi negara bagian Myanmar untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini, termasuk daerah Kayah, Kayin, Magway, Saigang, dan Bago, *AHA centre* juga akan memfasilitasi akses untuk pengiriman bantuan dan akan bekerjasama dengan *The Myanmar Task Force* dan *National Solidarity and Peace Making Negotiations Committee* (ASEAN Secretary, 2022). Pada agustus 2021 ASEAN melalui *AHA Centre* juga telah mengumpulkan 8 USD untuk bantuan ke Myanmar, dan distribusinya baru 1,5% lalu *AHA Centre* hanya dapat mendistribusikan melalui *Myanmar Red Cross Society* (Wahyuningrum, 2022).

Membuka babak baru dari realisasi lima poin konsensus ini, pada kunjungan special envoy ASEAN ke Myanmar yang kedua kalinya di tanggal 30 juni – 2 Juli 2022 berhasil menemui perwakilan tujuh partai politik Myanmar dan juga perwakilan dari Kelompok Etnik Bersenjata (EAO) yang telah menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), dalam pertemuan tersebut Kamboja berdiskusi mengenai bagaimana mewujudkan perdamaian, lalu berdiskusi dan melaporkan mengenai dampak parah dari kondisi politik ini terhadap kekerasan warga sipil, pembakaran desa dan juga mereka ingin berdamai tanpa adanya kekerasan. Pertemuan tersebut dilakukan tanpa melibatkan partai NLD dan mayoritas

partai politik lainnya, adapun partai pro-militer yaitu USDP banyak membahas mengenai bukti 1800 anggota partai tewas dan kerugian yang disebabkan oleh Partai Persatuan Nasional (NUG) dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) pertemuan ini menimbulkan banyak reaksi masyarakat karena saat itu ASEAN juga menyinggung mengenai eksekusi mati dan meminta mengembalikan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah.

Eksekusi mati dilakukan kepada empat pria politikus yang merupakan rezim pro demokrasi serta salah satunya merupakan mantan anggota NLD, menjadi salah satu dari bukti dari banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar, saat ini Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar melaporkan bahwa jumlah korban hingga Juli 2021 sebanyak 14.874 orang yang telah ditangkap, dan diperkirakan 2.114 orang termasuk anak-anak dan perempuan telah dibunuh oleh pasukan militer (Jalil, 2022).

Respon ASEAN mengenai eksekusi Empat Aktivis oposisi Myanmar ini sangat kecewa karena dianggap tidak mengindahkan lima poin konsensus yang telah disepakati, bahkan Ketua ASEAN mengatakan bahwa akan memikirkan kembali mengenai lima poin konsensus jika lebih banyak tahanan dieksekusi, karena saat ini keadaan di Myanmar bukan lagi mengenai krisis politik dan pelanggaran HAM melainkan ekonomi dan kemanusiaan (ABC News, 2022).

#### IV. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan perannya ASEAN berperan sebagai sarana komunikasi dan kerjasama, ASEAN juga berperan sebagai wadah untuk membentuk forum yang menghasilkan kesepakatan, dan berperan sebagai fungsi administrasi untuk merealisasikan kesepakatannya. Namun ada beberapa hambatan dalam merealisasikan kesepakatan, karena Myanmar memiliki kebijakan politiknya sendiri sehingga lima poin konsensus bukan prioritas utama Myanmar, dan jika melihat pada fungsi organisasi internasional itu sendiri, OI memang tidak memiliki fungsi pelaksanaan kedaulatan (*sovereignty*) dan kekuasaan (*power*) seperti yang dimiliki negara,

maka ASEAN yang memiliki prinsip tidak ikut campur disini mencerminkan fungsi tersebut. Dalam organisasi internasional, dasarnya adalah demokrasi sehingga dalam menciptakan sebuah aturan perlunya diskusi untuk melakukan kesepakatan. Hasil dari kesepakatan tersebut diadopsi dan pelaksanaannya bergantung pada negara terkait, namun hal ini hanya akan berjalan di negara demokrasi saja, sehingga ASEAN sebagai kawasan regional yang memiliki legitimasi hanya dapat berperan sebagai wadah yang dapat mendukung dan mendorong terealisasinya kesepakatan menjadi tindakan yang nyata tanpa melanggar kedaulatan Myanmar. Lalu mengenai prinsip tidak ikut campur, peneliti melihat bahwa prinsip ini cukup menghambat peran ASEAN khususnya dalam peran administratif mengenai lima poin konsensus, dimana poin-poin konsensus ini tidak terlaksana sepenuhnya karena Myanmar memiliki jalan politiknya sendiri sehingga ASEAN tidak dapat melakukan intervensi apapun mengenai hal tersebut.

Dalam menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi pasca kudeta militer ASEAN tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi saja namun, ASEAN bertindak berdasarkan prinsip ASEAN Charter dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kawasan melalui forum yang dibentuk oleh ASEAN untuk membentuk kesepakatan yang bertujuan membantu mengatasi krisis politik di Myanmar serta menghentikan kekerasan yang terjadi untuk mengatasi dan menghadapi pelanggaran HAM. Peran tersebut meliputi peran ASEAN sebagai sarana kerjasama dan komunikasi dimana ASEAN melakukan komunikasi antar negara anggota mengenai krisis politik yang terjadi di Myanmar serta adanya kekerasan yang menyebabkan pelanggaran HAM, lalu dalam forum IAMM ASEAN menyerukan bahwa seluruh anggota harus melakukan dialog secara konstruktif untuk membahas Myanmar. Kedua, peran ASEAN sebagai wadah dalam menghasilkan keputusan, pada *ASEAN Leaders' Meeting* tanggal 24 April 2022 ASEAN menghasilkan kesepakatan lima poin konsensus untuk membantu menghadapi krisis politik khususnya dalam menghadapi pelanggaran HAM

yang terjadi di Myanmar. Ketiga, ASEAN berperan dalam merealisasikan kesepakatan sebagai sarana administratif, dan ASEAN telah mendorong terealisasinya kesepakatan tersebut khususnya dalam konsensus mengirim bantuan kemanusiaan.

Dalam analisis peran ASEAN sebagai sarana administratif belum sepenuhnya dapat direalisasikan karena ASEAN memegang teguh prinsip tidak ikut campur, sehingga yang dapat menghentikan kekerasan itu sendiri hanya Myanmar dan segala bentuk tindakan peran yang dilakukan ASEAN pada tahun 2021 hingga 2022 merupakan bagian dari upaya ASEAN dalam menghadapi isu pelanggaran HAM di Myanmar pasca kudeta militer.

## REFERENSI

- Agencies, A. J. (2021, Agustus 18). *More than 1,000 killed in Myanmar since February 1 Coup*. Retrieved Maret 28, 2022.
- Aljazeera. (2021). *ASEAN Demands 'Immediate Cessation of Violence' in Myanmar*. Retrieved Juli 30, 2022.
- Ambarwati, & Wiratmadja, S. (2016). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Archer, C. (2001). *International Organizations: Third Edition*. London and New York: Routledge.
- ASEAN, S. (2021). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting ASEAN. ASEAN (pp. 1-4). Jakarta, Republic of Indonesia: ASEAN Secretariat. Retrieved from ASEAN.
- BBC Indonesia. (2021, Februari 2). *Kudeta militer di Myanmar: Siapa Min Aung Hlaing, jenderal yang kini mengambil alih kekuasaan?* Retrieved Maret 17, 2022.
- Burchill, S. (2005). Liberalism. In e. a. Scott Burchill, *Theories of International Relations Thrid Edition* (pp. 55-83). New York: Palgrave Macmillan.
- Cho, V., & Gilbert, D. (2021). Ethnicity, Culture, and Religion. In A. Simpson, & N. Farrelly, *Myanmar: Politics, Economy and Society* (pp. 219-248). New York: Routledge.
- Colville, R. (2021). *"Press Briefing notes on Myanmar" United Nations on Human Rights: Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights*. Retrieved Juli 9, 2022.
- Goldman, R. (2022, April 7). *Myanmar's Coup, Explained*. Retrieved July 2022, 2022.
- Hsien-Lie, T. (2011). *The ASEAN Inter-Governmental Commision on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia*. United States: Cambridge University Press.
- Indonesia, M. L. (2021, Maret 3). *Press Briefing Menlu RI: Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting*. (M. Indonesia, Editor) Retrieved Juli 30, 2022.
- Internasional, A. (2021). *Everything You Need to Know About Human Rights in Myanmar*. Retrieved Juli 9, 2022.
- Jalil, Z. A. (2022, July 25). *Myanmar: Military Executes Four Democracy Activists Including ex-MP*. Retrieved Agustus 1, 2022.
- Kharisma, M. W. (2022, Agustus 12). Peneliti dari Departemen Hubungan Internasional CSIS (Centre for Strategic and International Studies). (L. Riva, Interviewer).
- Meiser, J. W. (2017). Liberalism. In E. A. Stephen McGlinchey, *International Relations Theory* (pp. 22-27). Bristol, England: E-International Relations Publishing.
- Navaro, I., Royo, J. M., Garcia, J. U., Arestizabal, P. U., & Arino, A. V. (2021). *Alert 2021! Report on Conflicts, Human Rights, and peacebuilding*. Barcelona: Escola De Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
- News, A. (2022, Agustus 3). *ASEAN To Rethink Peace Plan if Myanmar Executes More Prisoners Says Cambodia PM*. Retrieved Agustus 5, 2022.
- Oratmangun, D. (2010). *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Pease, K.-K. S. (2019). *International Organizations Perspective on Global Governance*. New York: Routledge.
- Purwandoko, P. H. (2021). Prospek Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (Harapan Baru, Kelemahan dan Solusi). *Journal Yustisia, Vol. 1, No. 2*, 121-128.
- Putri, A. S., Jasmine, P., Salma, R., Bagasta, G. S., & Faturrahman, M. P. (2021). Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar. *Nation State: Journal of International Studies Vol. 4 No. 1*, 117-139.
- Putri, D. A. (2019). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015. *Journal of International Relations, Vol. 5, No. 1*, 998-1006.

- Ramadhani, Z., & Maburrah. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN Terhadap Upaya Negosiasi Indonesia dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal, Volume: 5, No. 2*, 126-143.
- S.D.J, F. I., T, E. D., & N, F. R. (2021). Kudeta Myanmar: Junta Militer di Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya, Volume 1, No. 1*, 43-58
- Secretary, A. (2022). Press Release on the Outcomes of the Consultative Meeting on ASEAN Humanitarian Assistance to Myanmar. (pp. 1-3). Phnom Penh: ASEAN Secretary.
- Strangio, S. (2021, April 27). *Assesing the Outcome of ASEAN's Special Meeting on Myanmar*. Retrieved Juli 30, 2022.
- Tom Allard, e. a. (2021, April 24). *SE Asian Nations say Consensus Reached on Ending Myanmar Crisis*. Retrieved Maret 28, 2021.
- United Nations. (2022, Maret 15). *Myanmar: 'Apalling' Violations Demand Unified and Resolute International Response*. Retrieved Maret 24, 2022.
- Wahyuningrum, Y. (2022, Juli 18). Wakil Indonesia untuk AICHR. (L. Riva, Interviewer).
- Watch, H. R. (2021). *Myamar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On HRW*. Retrieved Juli 31, 2022.
- Win, T. S. (2021, Oktober 1). *The Coup United the People of Myanmar Against Oppression*. Retrieved April 9, 2022.